

**PENDIDIKAN BERKUALITAS DI SEKOLAH
AKSES MENUJU SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERINTEGRITAS
DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0**

Sigit Tri Utomo*
Dosen STAINU Temanggung

Abstract

Education actually forms a quality human with the system, but the education system in some educational institutions in reality is still a gap for some people to do things that are not in accordance with the regulations made by these educational institutions such as cases of anarchism and bullying that touch students and educators or even the organization in the education institution which should be a potential developer of students becomes the ways of seniority to act violently on their younger siblings. Educational problems and educational issues make the education system cause an imbalance in self-quality. Innovation, regulation and quality education systems are one of the efforts to improve the quality of education so that efforts to increase resources with integrity can be realized optimally. The method of data collection in this study uses literature. In this stage, the researcher seeks to select data (books) that have relevance to the urgency of quality and quality education as access to a human resource of integrity. In this writing the analysis used with hermeneutics, namely the author describes the text there is the meaning of the context or behind explicit meaning there is an explicit meaning if interpreted literally can be interpreted as interpretation or interpretation. This step of the method is intended to capture the meaning, value and purpose of quality education in schools as access to a human resource of integrity. Then the writer also uses synthesis analysis, meaning the stages of an object of scientific study that connects a meaningful articulation of one with another meaning which is then found a knowledge with a new articulation in the form of quality school education as access to human resources with integrity. The author also uses content analysis, namely research conducted on information documented in recordings, both images, sounds, writing and others. With this method data analysis and scientific processing of the contents of the writing of quality school education will be carried out as access to a human resource of integrity.

Key-words: Quality Education, School, Human Resources Integrity

Abstrak

Pendidikan sejatinya membentuk manusia yang berkualitas dengan sistemnya, akan tetapi sistem pendidikan yang ada di beberapa lembaga pendidikan realitanya masih ada celah bagi sebagian seseorang untuk melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan regulasi yang dibuat lembaga pendidikan tersebut seperti kasus *anarkisme dan bullying* yang menyentuh peserta didik maupun pendidiknya

*Penulis adalah Dosen di STAINU Temanggung

atau bahkan organisasi dilembaga pendidikan tersebut yang seharusnya sebagai pengembang potensi peserta didik justru menjadi cara-cara senioritas melakukan tindak kekerasan pada adik tingkatnya. Problematika pendidikan dan isu-sisu pendidikan menjadikan pada sistem pendidikan menyebabkan ketidak seimbangan kualitas diri. Inovasi, regulasi dan sistem pendidikan yang berkualitas adalah salah satu upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan sehingga usaha meningkatkan sumber daya yang berintegritas dapat terealisasi dengan optimal.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka. Dalam tahapan ini, peneliti berusaha menyeleksi data-data (buku) yang ada relevansinya dengan urgensi pendidikan bermutu dan berkualitas sebagai akses menuju sumber manusia daya yang berintegritas. Dalam penulisan ini analisis yang digunakan dengan hermeneutika, yakni penulis memaparkan teks ada makna konteks atau dibalik makna tersurat ada arti tersurat jika diartikan secara harfiah dapat diartikan sebagai penafsiran atau *interpretasi*. Langkah metode ini dimaksud untuk menangkap arti, nilai dan maksud pendidikan berkualitas di sekolah sebagai akses menuju sumber manusia daya yang berintegritas. Kemudian penulis juga menggunakan analisis sintesis berarti tahapan terhadap suatu objek kajian ilmiah yang mengaitkan sebuah artikulasi makna satu dengan makna lain yang kemudian ditemukan sebuah pengetahuan dengan artikulasi baru berupa pendidikan di sekolah berkualitas sebagai akses menuju sumber manusia daya yang berintegritas. Penulis juga menggunakan *content analysis* yaitu penelitian yang dilakukan terhadap informasi yang didokumentasikan dalam rekaman, baik gambar, suara, tulisan dan lain-lain. Dengan metode ini akan dilakukan analisis data dan pengolahan secara ilmiah tentang isi tulisan pendidikan di sekolah berkualitas sebagai akses menuju sumber manusia daya yang berintegritas.

Key-words: Pendidikan Bermutu dan Berkualitas, Sumber Daya Manusia Berintegritas

PENDAHULUAN

Selama ini pendidikan sering dikaitkan dengan masalah kualitas dan sumber daya, manajemen di sekolah, kurikulum, kompleksitas problematika pendidikan seharusnya menjadi perhatian secara serius *stake holder* termasuk praktisi pendidikan. Pendidikan seharusnya memberi solusi terhadap masalah yang ada di masyarakat.

Pendidikan adalah usaha sadar mengembangkan potensi manusia baik potensi fisik maupun potensi non fisik. Dengan pendidikan diharapkan seseorang menjadi manusia bermutu yang memiliki potensi. Pendidikan tidak bisa diartikan sebagai kegiatan mentransfer ilmu, teori dan kademik semata. Atau bukan hanya sekedar ujian, penetapan kriteria kelulusan serta pencetakan ijazah semata. Pendidikan bisa dimaknai sebagai proses maturitas kualitas hidup, memahami arti dan hakikat hidup sebenarnya, serta dapat mengerti bagaimana melaksanakan hidup sebagaimana mestinya. Karena esensinya pendidikan difokuskan dan diarahkan pada pembentukan kepribadian unggul dengan menitikberatkan proses pematangan kualitas logika, hati dan akhlak manusia.

Pendidikan di Indonesia diharapkan dapat mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia di Indonesia dalam

rangka mewujudkan tujuan nasional.¹Oleh karena itu, pendidikan tidak boleh menjerumuskan manusia ke dalam jurang kesesatan. Pendidikan tidak boleh melahirkan sikap, pemikiran, dan perilaku semu yang merugikan manusia. Pendidikan haruslah mampu menyatukan sikap, perilaku, hati nurani, dan keimanan menjadi satu kesatuan yang holistik. Pendidikan berperan membantu manusia memahami cara hidup yang benar. Pendidikan membantu manusia memahami rahasia kehidupan. Pendidikan juga yang membantu manusia memahami mana yang salah, mana yang benar, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal dan mana yang haram. Pendidikan berperan membantu manusia memahami, hakikat, dan tujuan hidup yang benar.

Karena persoalan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini bukan pada menurut kualitasnya sumber daya manusianya, namun lebih tepat pada sistem dan lingkungan pendidikan yang tidak mampu menunjang bagi perkembangan manusia secara maksimal.²Sehubungan dengan demikian gencarnya pengaruh globalisasi lengkap dengan munculnya berbagai kejadian yang paradoksal.³

Selain itu pendidikan juga membantu manusia melepaskan kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan. Pendidikan membantu manusia dari beban berat tersebut. Dengan demikian diharapkan tumbuh kesadaran, tanggung jawab, semangat, dan motivasi manusia untuk melepaskan diri dari kebodohan, dan keterbelakangan. Pendidikan pula yang membantu diri manusia menemukan jati dirinya karena pendidikan pada hakikatnya adalah proses pembentukan watak pada diri manusia.

Masyarakat melihat pendidikan tidak lagi dipandang hanya sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan terhadap perolehan pengetahuan dan keterampilan dalam konteks waktu sekarang.⁴ Memasuki era reformasi, masyarakat pendidikan selain dihadapkan dengan kompleksitas perubahan juga dipaksa memasuki era persaingan yang ketat. Untuk itu masyarakat mau tidak mau harus mampu menyikapi persaingan dan mengatasi persaingan itu dengan mengenyam pendidikan yang bermutu. Dalam tulisan ini, penulis akan menguraikan mengenai problematika dan isu-isu penyelenggaraan pendidikan mengupayakan pendidikan yang bermutu dan berkualitas, cara berinovasi dalam pendidikan di sekolah berkualitas sebagai akses menuju SDM yang berintegritas.

METODE PENELITIAN

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kualitatif deskripsi dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Dalam tahapan ini, peneliti berusaha membaca, menelaah, memeriksa dan menyeleksi data-data (buku), jurnal ilmiah dan jurnal online, prosiding seminar yang ada relevansinya dengan urgensi pendidikan bermutu dan berkualitas sebagai akses menuju sumber

¹Abudin Nata, *Manajemen Pendidikan; Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 229.

²Zuhari, dkk. *Metodik Khusus Pendidikan Agama; Dilengkapi dengan Sistem Modul dan Permainan Simulasi* (Surabaya: Biro Ilmiah Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya dan Usaha Offset Printing, 1983), 27.

³Mastuhu, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999) hlm. 4.

⁴Marno dan Triyo Supriyanto, *Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam*, (Bandung: Refrika Aditama, 2008), 7.

manusia daya yang berintegritas. Dalam penulisan ini analisis yang digunakan dengan hermeneutika, yakni penulis memaparkan dibalik teks ada makna konteks dan makna tersurat ada arti tersurat jika diartikan secara harfiah dapat diartikan sebagai penafsiran atau *interpretasi*. Langkah metode ini dimaksud untuk menangkap arti, nilai dan maksud pendidikan bermutu dan berkualitas sebagai akses menuju sumber manusia daya yang berintegritas. Kemudian penulis juga menggunakan analisis sintesis berarti tahapan terhadap suatu objek kajian ilmiah yang mengaitkan sebuah artikulasi makna satu dengan makna lain yang kemudian ditemukan sebuah pengetahuan dengan artikulasi baru berupa pendidikan di sekolah berkualitas sebagai akses menuju sumber manusia daya yang berintegritas. Penulis juga menggunakan *content analysis* yaitu penelitian yang dilakukan terhadap informasi yang didokumentasikan dalam rekaman, baik gambar, suara, tulisan dan lain-lain. Dengan metode ini akan dilakukan analisis data dan pengolahan secara ilmiah tentang isi tulisan pendidikan di sekolah berkualitas sebagai akses menuju sumber manusia daya yang berintegritas.

PEMBAHASAN

Problematika dan Isu-Isu Penyelenggaraan Pendidikan

Sistem pendidikan nasional cenderung menempatkan porsi pengajaran lebih besar dari pada pendidikan, sehingga kegiatan pendidikan cenderung diidentikkan dengan proses peningkatan kemampuan, keterampilan dan kecenderungan belaka. Sementara itu, urusan pembentukan kepribadian unggul dan budaya mutu belum diperhatikan secara mendasar. Suasana ini berpengaruh langsung pada orientasi pembelajaran yang lebih mengutamakan proses penguasaan materi dan nilai dari pada pembentukan kepribadian. Sistem dan proses itulah yang menyebabkan ketidakseimbangan kualitas diri.

Ketidakseimbangan penyajian porsi tersebut antara lain disebabkan oleh banyaknya mata pelajaran dan padatnya materi yang harus diberikan pada peserta didik, sehingga waktu pembelajaran yang berlangsung di kelas cepat habis oleh kegiatan menyampaikan materi saja, sedangkan tugas pokok lainnya, yaitu meningkatkan pertumbuhan dan improvisasi potensi serta pembentukan kepribadian peserta didik menjadi terabaikan. Selain itu ketidakseimbangan penyampaian porsi pengajaran tersebut disebabkan oleh adanya evaluasi yang bersifat kognitif dan keterampilan sehingga mengesampingkan evaluasi yang bersifat afektif yakni kepribadian secara utuh. Itulah sebabnya kegiatan pembelajaran sulit berkembang secara pemenuhan kebutuhan kognitif peserta didik dengan pemenuhan kebutuhan kepribadian yang menjadi modal peserta didik dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya.

Secara garis besar problematika dan isu-isu penyelenggaraan pendidikan di Indonesia pada dasarnya dijelaskan seperti di bawah ini:⁵

Pada dasarnya problematika penyelenggaraan didasarkan pada: *Pertama*, sumber daya pendidikan belum cukup andal untuk mendukung tercapainya target pendidikan secara efektif. Sumber daya pendidikan baik kinerja guru, kualitas budaya belajar siswa, anggaran pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan, manajemen pendidikan, termasuk kepemimpinan pendidikan dan sumber daya lainnya, masih dipandang lemah dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional,

⁵Dedi Mulyasa, *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing* (Bandung: Rosda, 2011), 16-18.

baik dalam pembentukan keimanan, ketakwaan, kecerdasan, keterampilan maupun akhlak mulia di kalangan para pendidik dan para peserta didik. Sumber daya pendidikan yang lebih banyak difokuskan pada urusan administrasi dari pada diarahkan pada proses pembelajaran secara utuh, total dan menyeluruh. Oleh sebab itu, perlu adanya penataan ulang terhadap kebijakan dan tata kelola pendidikan yang pelaksanaannya disamakan dengan bidang lain yang tujuan, fungsi, dan perannya berbeda dengan lembaga pendidikan.

Kedua, sistem pembelajaran lebih menitikberatkan pada kualitas hasil daripada proses. *Ketiga*, kurikulum, proses pembelajaran dan sistem evaluasi masih bersifat parsial terhadap tujuan pendidikan nasional. Tujuan tersebut terkesan masih bersifat parsial terhadap kurikulum, proses pembelajaran dan sistem evaluasi belajar baik evaluasi belajar dalam bentuk ujian nasional maupun dalam bentuk ulangan dan ujian lokal di sekolah. Kesenjangan antara antara tujuan pendidikan nasional dengan hasil belajar dapat dilihat dari tampilan para lulusan yang belum mencerminkan nilai-nilai sebagaimana tertuang dalam tujuan pendidikan nasional.

Hasil belajar dikalangan para lulusan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi belum mencerminkan terbentuknya watak bangsa yang bermartabat. Sistem pembelajaran yang dipola berdasarkan kurikulum yang kaku dan memaksa para peserta didik untuk mengikuti dan menyesuaikan diri dengan pola tersebut. Dengan demikian para peserta didik tidak memiliki banyak peluang untuk mengembangkan minat, kemampuan, dan kebutuhannya tapi lebih banyak dipaksa untuk mengikuti program kependidikan yang telah ditetapkan oleh guru sebagai kebijakan pemerintah.

Empat, manajemen pendidikan dan kinerja mengajar guru/dosen lebih menitikberatkan pada tuntutan administratif dari pada menciptakan budaya belajar yang bermutu. Pemerintah, pimpinan prodi, atau kepala sekolah cenderung menghargai lembaran RPP dari pada memperhatikan proses dan hasil belajar. Kepala sekolah atau pimpinan prodi lebih tertarik pada laporan kelulusan daripada memperhatikan kualitas dan kematangan peserta didik. Sebagian daya dukung tata kelola pendidikan yang profesional praktik seperti itu dianggap sebagai sesuatu yang wajar, tetapi alangkah bijaknya apabila kebijakan dikembangkan ke arah pengembangan kualitas dan kematangan peserta didik.

Kelima, perubahan berbagai kebijakan dan kurikulum pendidikan belum mampu menjawab kualitas proses dan mutu lulusan. Dari waktu ke waktu dan dari tahun ke tahun, pemerintah selalu berupaya meningkatkan kualitas pendidikan di semua jenjang dan jalur. Upaya tersebut disertai dengan kerja keras semua pihak baik pemerintah termasuk pimpinan pendidikan tinggi, menengah, dasar, maupun orang tua dan masyarakat. Namun demikian, kualitas proses dan lembaga pendidikan tinggi kenyataannya belum siap memasuki wilayah kompetisi yang berkembang pada seperti saat ini. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan kinerja profesional sehingga terwujud harapan untuk membangun kualitas proses dan mutu lulusan terbaik.

Keenam, peningkatan anggaran pendidikan dan fasilitas belajar belum berdampak secara signifikan terhadap kultur dan kinerja mengajar guru serta budaya belajar siswa/ mahasiswa. Besarnya anggaran pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebesar 20% dari APBN nampaknya sedikit mampu meningkatkan kualitas sarana dan prasarana menjadi lebih baik jika dibanding

dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian masih banyak lembaga pendidikan yang masih belum mendapatkan sarana dan prasarana yang lebih baik dalam menunjang proses belajar di institusi pendidikan mereka sehingga jelaslah para guru dan dosen masih kurang profesional dalam menggunakan sarpras pembelajaran.

Ketujuh, pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan di sekolah belum didukung oleh sistem, kultur, dan kinerja mengajar serta budaya belajar secara menyeluruh. *Kedelapan*, pendidikan telah dipersempit maknanya menjadi pengajaran. Pengajaran pun dipersempit menjadi kegiatan menstransfer ilmu yang puncaknya ujian demi ujian. Dengan demikian ujian dianggap sebagai puncaknya pendidikan. Prestasi belajar hanya diukur dari kemampuan menjawab sejumlah soal.

Masalah-masalah tersebut pada gilirannya akan menciptakan kegiatan belajar yang hanya akan menekankan pada unsur pengetahuan dengan sistem hafalan saja. Makin kuat hafalan peserta didik terhadap materi pelajaran di sekolah, makin besar penghargaan yang diberikan sekolah terhadap peserta didik itu.

Hal itu dimungkinkan karena sistem evaluasi pengajaran yang diberlakukan selama ini umumnya terbatas pada nilai kognitif. Sementara sikap, nilai, dan moralnya tidak terdeteksi secara cermat dalam evaluasi tersebut. Oleh sebab itu, wajar bila ada kesan bahwa standar keberhasilan belajar identik dengan kemampuan mengisi soal-soal, sedangkan urusan sikap, kepribadian, atau akhlaknya tidak dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan standar prestasi. Padahal kegiatan pendidikan adalah kegiatan terpadu antara kemampuan sikap, intelektual, dan perilaku.

Meningkatkan Pendidikan Bermutu dan Berkualitas

Pendidikan berkualitas adalah pendidikan yang mampu melakukan proses pematangan kualitas peserta didik yang dikembangkan dengan cara membebaskan peserta didik dari ketidaktahuan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan, ketidakbenaran, ketidakjujuran, dan dari buruknya akhlak dan keimanan.

Dedi Mulyasana memaparkan bahwa pendidikan bermutu dan berkualitas lahir dari sistem perencanaan yang baik (*good governance system*) dan disampaikan oleh pendidik yang baik (*good teachers*) dengan komponen yang bermutu khususnya pendidik. Ada beberapa langkah dalam menciptakan pendidikan bermutu diantaranya:⁶

1. Pemberdayaan lembaga pendidikan

Untuk mendukung tercapainya pola penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, pimpinan lembaga pendidikan harus melakukan langkah yang efektif, efisien, dan produktif. Para penyelenggara pendidikan setidaknya mampu memberdayakan lembaganya sesuai dengan kondisi dan kemampuannya. Untuk mengetahui hal itu para pimpinan lembaga pendidikan harus melakukan analisis yang tepat. Hasil pengkajiannya diperlukan untuk mengetahui posisi dan kategori lembaga pendidikan yang dipimpin pada level tertentu.

2. Sistem penjaminan mutu pendidikan

⁶Dedi Mulyasa, *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing* (Bandung: Rosda, 2011), 120-123.

Terkait dengan pengembang sistem penjaminan mutu, perlu dirumuskan paradigma dan prinsip dan penjaminan mutu pendidikan berupa: pendidikan untuk semua yang inklusif dan tidak mendiskriminasi peserta didik atas dasar latar belakang apa pun, pembelajaran sepanjang hayat berpusat pada peserta didik yang memperlakukan, memfasilitasi dan mendorong peserta didik menjadi insan pembelajar yang mandiri, kreatif inovatif, dan berkewirausahaan, pendidikan untuk perkembangan berkelanjutan (*education for sustainable development*), yaitu pendidikan yang mampu mengembangkan peserta didik menjadi rahmat bagi seluruh alam.

3. Penjaminan mutu pendidikan informal

Penjaminan mutu pendidikan dilaksanakan oleh masyarakat baik secara perseorangan, kelompok, maupun kelembagaan, penjaminan mutu pendidikan informal oleh masyarakat dapat dibantu dan diberi kemudahan oleh pemerintah ataupun pemerintah daerah.

4. Penjaminan mutu pendidikan formal dan non formal

Penjaminan mutu pendidikan dan satuan pendidikan oleh satuan dan program pendidikan ditujukan untuk memenuhi tiga tingkatan acuan mutu, yaitu Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Nasional Pendidikan (SNP), dan standar mutu pendidikan di atas SNP yang dipilih satuan atau program pendidikan formal. Ketiga acuan tersebut dijadikan sebagai acuan mutu satuan atau program pendidikan formal. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa dalam menciptakan pendidikan bermutu diperlukan adanya sistem penjaminan mutu baik di lembaga pendidikan formal, non formal bahkan pendidikan informal sekalipun sehingga dengan adanya sistem penjaminan mutu pendidikan, mutu pendidikan dapat tercipta. Sehingga memerlukan rencana strategis dalam pengembangan di sekolah. Edward Sallis mengemukakan proses perencanaan strategis dalam konteks pendidikan tidak jauh berbeda dengan biasanya dipergunakan dalam dunia industri. Alat-alat yang digunakan untuk menentukan misi dan tujuan akhir serta untuk menganalisa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman juga hampir sama, hanya perlu penerjemahan yang baik. Alat-alat itu sendiri harus sederhana dan mudah dipergunakan. Kekuatan-kekuatan alat tersebut berasal dari fokus yang mereka berikan terhadap proses berpikir institusi. Alat-alat tersebut mempertanyakan keberadaan institusi tersebut, untuk siapa institusi tersebut ada, dan apakah mempunyai tujuan yang benar.⁷

Sama halnya dengan Suyanto dan Abbas, dalam menciptakan mutu pendidikan diperlukan strategi, seperti:⁸

1. Upaya meningkatkan mutu pendidikan sangat memerlukan seorang pimpinan yang mengenali masalah-masalah tidak hanya dari kulitnya, tetapi sampai dengan darah dan dagingnya. Bukan hanya kenal masalah, tetapi juga memiliki motivasi untuk menyelesaikan masalah tersebut.
2. Peningkatan mutu pendidikan sangat ditentukan oleh kesiapan sumber-sumber daya manusia yang terlibat. Bukan hanya guru, kepala sekolah dan karyawan tetapi juga para siswa dan orang tuanya. Oleh karena itu, pemahaman bersama terhadap visi, misi, dan tujuan organisasi sekolah sangat mendasar sebelum

⁷ Edward Sallis, *Manajemen Mutu Pendidikan* (Ircisod, 2006), 212.

⁸Suyanto dan Abbas, *Wajah dan Dinamika Pendidikan Anak Bangsa* (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2001), 108-111.

mensosialisasikan rencana meningkatkan mutu pendidikannya. Dalam rangka menggalang kerja sama untuk peningkatan mutu tersebut diperlukan pertemuan antara pihak-pihak sekolah dengan orang tua siswa untuk membangun komitmen mereka tentang pembimbingan dan pengawasan belajar putra-putrinya. Dengan begitu, secara perlahan tapi pasti kinerja yang strategis ditumbuhkembangkan antara lingkungan sekolah dengan lingkungan rumah tangga. Menciptakan kebersamaan adalah prasyarat yang mesti diadakan sebelum lanjut seorang kepala sekolah meminta peran serta guru, siswa dan orang tuanya.

Pantas dicatat bahwa pelibatan unsur orang tua dan masyarakat ke dalam program sekolah selama ini belum baru sebatas berpartisipasi pada aspek pendanaan kebutuhan sekolah dan belum banyak menyentuh aspek manajerial dan penetapan serta pelaksanaan suatu kebijakan.

3. Tingkat pemahaman terhadap kondisi nyata dan tantangan ke depan (yang dihadapi sekolah, masyarakat dan bahkan negara sekalipun) dikalangan orang tua, guru, siswa akan sangat mewarnai pada ketepatan strategi yang akan disusun untuk peningkatan mutu pendidikan tersebut. Keterampilan empat hal berikut sangat dibutuhkan yaitu keterampilan mengidentifikasi berbagai kekuatan yang dimiliki dan potensial yang dikembangkan, mengenali kelemahan atau kekurangan yang melekat, peluang yang tersedia dan ancaman yang diperkirakan. Kepala sekolah cukup memberikan pendelegasian saja apabila memiliki sejumlah guru yang sangat tanggap terhadap situasi yang ada disekitarnya dan dengan kesadaran mereka bersemangat membangun kualitas pendidikan di sekolahnya. Sebaliknya, kepala sekolah harus menggunakan instruksi bila tingkat kesadaran para gurunya tidak terlalu menggembirakan.

Berinovasi pada Pendidikan yang Bermutu dan Berkualitas

Dalam menciptakan pendidikan yang bermutu, tentunya memerlukan inovasi sehingga pendidikan yang berkualitaslah yang mampu berkompetisi.

Menurut Hasbullah, ada beberapa hal yang menuntut adanya inovasi dalam pendidikan, diantaranya:⁹

1. Perkembangan ilmu pengetahuan

Adanya perkembangan ilmu pengetahuan tidak bisa dipungkiri mengakibatkan kemajuan teknologi yang mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi politik, pendidikan dan kebudayaan bangsa Indonesia. Diakui bahwa sistem pendidikan dan dilaksanakan selama ini masih belum mampu mengikuti dan mengendalikan kemajuan-kemajuan tersebut, sehingga dunia pendidikan belum mampu dapat menghasilkan tenaga-tenaga pembangunan yang terampil, kreatif, inovatif, dan aktif mandiri yang sesuai dengan ketentuan dan keinginan masyarakat luas. Bagaimanapun berkembangnya ilmu pengetahuan modern menghendaki dasar-dasar pendidikan yang kokoh dan penguasaan kemampuan yang terus-menerus.

2. Pertambahan penduduk

Laju eksplorasi penduduk yang cukup pesat tentunya menuntut adanya perubahan-perubahan, sekaligus bertambahnya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang secara kumulatif menuntut tersedianya sarana dan

⁹Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 189.

prasarana pendidikan yang memadai. Kenyataan tersebut menyebabkan daya tampung, ruang dan fasilitas pendidikan sangat seimbang. Hal inilah juga yang menyebabkan sulitnya menentukan bagaimana relevansi pendidikan dengan dunia kerja sebagai akibat tidak seimbangnya antar *output* lembaga pendidikan dengan kesempatan yang tersedia.

3. Meningkatnya animo masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik

Munculnya gerakan inovasi pendidikan berkaitan erat dengan adanya berbagai tantangan persoalan yang dihadapi oleh dunia pendidikan dewasa ini, yang salah satu penyebabnya adalah ilmu pengetahuan yang terjadi senantiasa mempengaruhi aspirasi masyarakat, pada umumnya mereka mendambakan pendidikan yang lebih baik, padahal pada sisi lain kesempatan itu sangat terbatas, sehingga terjadilah kompetisi atau persaingan yang sangat ketat. Berkenaan dengan ini munculah sekolah-sekolah favorit, plus dan unggulan.

4. Menurunnya kualitas pendidikan

Kualitas yang dirasakan makin menurun, yang belum mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut adanya sejumlah perubahan, sebab bila tidak demikian, jelas akan berakibat fatal dan akan terus ketinggalan.

5. Kurang adanya relevansi antara pendidikan dan kebutuhan masyarakat yang sedang membangun.

Bagaimanapun dalam era modern sekarang, masyarakat menuntut adanya lembaga pendidikan yang benar-benar mampu diharapkan, terutama yang siap pakai dengan dibekali *skill* yang diperlukan dalam pembangunan. Umumnya kurang sesuainya materi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat telah diatasi dengan menyusun kurikulum baru. Oleh karena itu, dari perkembangan yang ada Indonesia yang kita ketahui telah mengalami beberapa kali perubahan kurikulum. Hal ini dilakukan karena dilakukan untuk mengatasi relevansi itu.

Dengan kurikulum baru inilah anak-anak dibina dan sikap yang sesuai dengan tuntutan masa kini dan masa yang akan datang. Aspek keterampilan merupakan unsur kurikulum baru yang selalu mendapatkan perhatian khusus dan prioritas utama.

6. Belum mekarnya alat organisasi yang efektif, serta belum tumbuhnya suasana yang subur dalam masyarakat untuk mengadakan perubahan-perubahan yang dituntut oleh keadaan sekarang dan yang akan datang.

Kenyataan seperti ini disebabkan masih minimnya pengetahuan dan wawasan masyarakat untuk membangun dirinya kepada kemajuan-kemajuan. Dalam berinovasi dalam pendidikan yang bermutu diperlukan pengelolaan pada tingkat sekolah. Seperti yang dikemukakan Harsono di bawah ini:¹⁰

Peran dan fungsi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan manajemen pendidikan tingkat sekolah. Beberapa aspek manajemen yang secara langsung dapat dipisahkan dari pelaksanaan manajemen yang secara langsung dapat diserahkan sebagai urusan yang menjadi kewenangan tingkat di sekolah.

1. Penetapan visi, misi, strategi, tujuan, dan tata tertib sekolah. Urusan ini sangat penting sebagai modal dasar yang harus dimiliki sekolah. Ini merupakan bukti

¹⁰Harsono, *Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007) hlm. 82.

kemandirian awal yang harus ditunjukkan oleh sekolah. Sebagai penjabaran dan lebih lanjut dari visi, misi, strategi dan tujuan sekolah tersebut. Orang tua dan masyarakat yang tergabung dalam komite sekolah, serta seluruh warga sekolah harus dilibatkan secara aktif dalam menyusun program kerja sekolah dan Rencana Anggaran Pendapatan Sekolah (RAPBS).

2. Kewenangan dalam penerimaan siswa baru sesuai dengan ruang kelas yang tersedia, fasilitas yang ada, jumlah guru, dan tenaga administratif yang dimiliki.
3. Penetapan kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler yang akan dan dilaksanakan oleh sekolah dalam hal ini dengan mempertimbangkan kepentingan daerah dan masa depan lulusannya, sekolah perlu diberikan kewenangan untuk melaksanakan kurikulum nasional dengan kemungkinan menambah atau mengurangi muatan kurikulum dengan meminta pertimbangan komite sekolah.
4. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk buku pelajaran dapat diberikan pada sekolah dengan memperhatikan standar dan ketentuan yang ada.
5. Penghapusan barang dan jasa dapat dilaksanakan sendiri oleh sekolah dengan mengikuti pedoman yang ditetapkan pemerintah, provinsi dan kabupaten.
6. Proses pengajaran dan pembelajaran. Ini merupakan kewenangan profesional sejati yang dimiliki lembaga pendidikan sekolah. Kepala sekolah dan guru secara bersama-sama merancang proses pembelajaran dan pengajaran yang memungkinkan peserta didik dapat belajar dengan lancar dan berhasil. Proses pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif dan menyenangkan direkomendasikan sebagai model pembelajaran yang akan dilaksanakan di sekolah.
7. Urusan teknis edukatif yang lain sejalan dengan konsep manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah merupakan urusan yang sejak awal menjadi tanggung jawab dan kewenangan setiap satuan pendidikan.

Akses Pendidikan Berkualitas Peningkatan SDM Berintegritas

Dalam meningkatkan mutu pendidikan diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bermutu, H.A.R Tilaar mengemukakan bahwa sumber daya manusia yang bermutu dapat dicapai melalui sistem pendidikan yang berkualitas yang mampu melahirkan sumber daya manusia yang andal dan berakhlak mulia, mampu bekerja sama dan bersaing di era globalisasi dengan tetap cinta tanah air. Sumber daya manusia yang bermutu tersebut memiliki eimanan dan ketakwaan serta mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja, dan mampu membangun budaya kerja yang produktif dan berkepribadian. Kualitas SDM yang diharapkan tersebut masih jauh dari produk pendidikan tinggi kita. Dalam berbagai penelitian internasional seperti yang dilaksanakan majalah *ASIA WEEK* beberapa tahun lalu menunjukkan betapa mutu pendidikan di Indonesia tidak menggembirakan. Dalam TAP MPR No.7/2001 dikatakan bahwa visi indonesia yaitu 2020 yaitu keinginan untuk maju diperlukan upaya-upaya sebagai berikut:¹¹

1. Meningkatkan kemampuan bangsa dalam pergaulan antar bangsa.

¹¹H.A. R Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 302.

2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia sehingga mampu bekerja sama dan bersaing di era global.
3. Meningkatnya kualitas pendidikan sehingga tenaga yang kompeten sesuai dengan standar nasional dan internasional.
4. Meningkatnya disiplin dan etos kerja.
5. Meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi serta pemberdayaan dalam masyarakat.
6. Teraktualisasinya keragaman budaya di Indonesia.

Selain sumber daya manusia, dalam pendidikan bermutu juga harus dimuat prinsip demokrasi dalam pendidikan seperti:¹²

1. Hak Asasi setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan.
2. Kesempatan yang sama bagi warga negara untuk memperoleh pendidikan.
3. Hak dan kesempatan atas dasar kemampuan mereka.

Dari kenyataan tersebut dapat dipahami bahwa ide dan nilai demokrasi pendidikan sangat banyak dipengaruhi oleh alam pikiran, sifat dan jenis masyarakat dimana mereka berada. Sebab dalam realitanya pengembangan demokrasi pendidikan tersebut akan banyak dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan dan penghidupan masyarakat. Umpamanya, masyarakat agraris akan berbeda dengan masyarakat metropolitan, modern dan sebagainya.

Apabila yang dikemukakan tersebut dapat dikaitkan dengan prinsip-prinsip demokrasi pendidikan yang telah diungkapkan, maka tampaknya ada beberapa butir penting yang harus diketahui dan diperhatikan, diantaranya:

1. Keadilan dalam pemerataan kesempatan belajar bagi semua warga negara dengan adanya pembuktian kesetiaan dan konsisten dalam sistem politik yang ada.
2. Dalam upaya pembentukan karakter bangsa sebagai bangsa yang baik.
3. Memiliki sesuatu ikatan yang erat dengan cita-cita nasional.¹³

Dapat dipahami bahwa bagi bangsa Indonesia dalam upaya pengembangan demokrasi mempunyai sifat dan karakteristik sendiri yang berbeda dengan yang dilaksanakan oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Hal ini tentu saja sangat dipengaruhi oleh latar belakang sosial yang telah berakar dengan kepribadian diri bangsa.

Hal ini misalnya tampak pada sifat-sifat kekeluargaan yang terus dipupuk dan dijaga, serta adanya aspek keseimbangan, aspek kebebasan dan tanggung jawab. Di bidang pendidikan, cita-cita demokrasi yang akan dikembangkan dengan tidak menanggalkan ciri-ciri dan sifat kondisi masyarakat yang ada, melalui proses vertikal dan horizontal komunikatif, perlu dirumuskan terlebih dahulu terutama yang berhubungan dengan nilai-nilai demokrasi. Sehingga nantinya akan nampak bahwa demokrasi pendidikan Pancasila berbeda dengan demokrasi pendidikan di negara lain.

Dengan begitu dapat dipengaruhi perbedaannya dengan rumusan aspek-aspek lain seperti demokrasi ekonomi, politik dan mungkin dalam bidang kebudayaan yang sangat erat kaitannya dengan kondisi yang menyertainya. Apabila pengembangan demokrasi pendidikan yang akan dikembangkan berorientasi kepada cita-cita dan nilai demokrasi tadi, maka berarti akan memperhatikan prinsip-prinsip berikut ini:¹⁴

¹²M. Djumbersyah Indar *Filsafat Pendidikan* (Surabaya: Karya Abditama, 1994), 118.

¹³M. Djumbersyah Indar *Filsafat Pendidikan* (Surabaya: Karya Abditama, 1994), 119.

1. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sesuai dengan nilai-nilai luhurnya.
2. Wajib menghormati dan melindungi hak asasi manusia yang bermartabat dan berbudi pekerti luhur.
3. Mengusahakan suatu pemenuhan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran nasional dengan memanfaatkan kemampuan pribadinya, dalam rangka mengembangkan kreasinya ke arah perkembangan dan kemajuan iptek tanpa merugikan pihak lain.

Jelaslah, dalam demokrasi pendidikan anak tidak hanya dipersiapkan sekedar cerdas dan terampil, akan tetapi mampu menghargai orang lain, disamping beriman dan intelektual. Kemampuan demikian memerlukan pengkayaan pengalaman-pengalaman menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam kehidupan yang mungkin dapat diperoleh dengan model pendidikan terbuka, demokratis dan dialogis.

Pelaksanaan demokrasi pendidikan di Indonesia pada dasarnya telah dikembangkan sedemikian rupa dengan menganut dan mengembangkan asas demokrasi dalam pendidikannya, terutama setelah diplokan kemerdekaan hingga sekarang. Pelaksanaan tersebut telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti berikut ini:¹⁵

1. Pasal 31 UUD 1945;
 - a. Ayat (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran
 - b. Ayat (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dalam undang-undang.

Dengan demikian di negara Indonesia, semua warga negara diberikan kesempatan yang sama untuk menikmati pendidikan, yang menyelenggarakan pendidikannya diatur oleh satu undang-undang nasional, dalam hal ini tentu saja Undang-undang No 2 tahun 1989.

2. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional, menurut undang-undang ini, cukup banyak dibicarakan tentang demokrasi pendidikan, terutama yang berkaitan dengan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan.
 - a. Pasal 5; Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan.
 - b. Pasal 6; Setiap warga negara berhak atas kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengikuti kespendidikan empatan pendidikan agar memperoleh ilmu pengetahuan, kemampuan dan keterampilan yang sekurang-kurangnya setara dengan kemampuan, keterampilan tamatan pendidikan dasar.
 - c. Pasal 7; Penerimaan seseorang sebagai peserta didik dalam satu satuan pendidikan diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, ras, suku, agama, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi dan tetap mengindahkan kekhususan satuan pendidikan yang bersangkutan.
 - d. Pasal 8;
 - 1) Warga negara yang memiliki kelainan fisik dan/ atau mental berhak memperoleh pendidikan luar biasa.

¹⁴M. Djumberansyah Indar *Filsafat Pendidikan* (Surabaya: Karya Abditama, 1994), 120..

¹⁵Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 248.

- 2) Warga negara yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa berhak memperoleh pendidikan khusus.
- 3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

3. GBHN di sektor pendidikan

Dalam beberapa kali GBHN ditetapkan sebagai ketetapan MPR hasil sidang umum MPR, senantiasa memuat masalah-masalah pendidikan. Untuk melihat sekedar gambaran pembahasan pendidikan didalam GBHN dapat dilihat seperti berikut:

- a. Pendidikan nasional berdasarkan pancasila, bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berakhlak mulia, berdisiplin, bekerja keras, bertanggung jawab, mandiri, cerdas, terampil, serta sehat jasmani dan rohani. Pendidikan nasional juga mampu menumbuhkan dan memperdalam rasa cinta tanah air, mempertebal semangat kebangsaan dan kesetiakawanan sosial. Sejalan dengan itu dikembangkan iklim belajar dan mengajar yang menumbuhkan sikap percaya diri sendiri serta sikap dan perilaku yang kreatif dan inovatif. Dengan demikian pendidikan nasional akan mampu mewujudkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab membangun bangsa.
- b. Pendidikan merupakan proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Karena itu pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.
- c. Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional, perlu segera disempurnakan sistem pendidikan nasional yang berpedoman pada undang-undang mengenai pendidikan nasional.
- d. Pendidikan nasional perlu dilakukan secara lebih terpadu dan serasi, baik antara sektor pendidikan dan sektor pembangunan lainnya, antar daerah maupun antar berbagai jenjang dan jenis pendidikan. Pendidikan, baik di sekolah maupun di luar sekolah, perlu disesuaikan dengan perkembangan tuntutan pembangunan yang memerlukan jenis keterampilan dan keahlian di segala bidang serta diangkat mutunya sesuai dengan kemajuan dan teknologi.
Sehubungan dengan itu, berbagai jenis pendidikan kejuruan dan keahlian termasuk politeknik diperluas dan ditingkatkan. Dismaping itu, perlu dikembangkan kerjasama antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga-tenaga yang cakap dan terampil bagi pembangunan di berbagai bidang terutama industri dan pertanian.
- e. Titik berat pembangunan pendidikan diletakkan pada peningkatan mutu setiap jenjang dan jenis pendidikan serta perluasan kesempatan belajar pada jenjang pendidikan menengah dalam rangka persiapan perluasan wajib belajar untuk pendidikan menengah pertama. Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan khususnya untuk memacu penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi perlu lebih disempurnakan dan ditingkatkan pengajaran ilmu pengetahuan alam dan matematika.

- f. Dalam rangka melaksanakan pendidikan nasional perlu makin diperluas, ditingkatkan dan dimantapkan usaha-usaha penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila sehingga semakin membudaya di seluruh lapisan masyarakat.
- g. Pendidikan Pancasila termasuk pendidikan pedoman penghayatan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan sejarah perjuangan bangsa serta unsur-unsur yang dapat meneruskan dan mengembangkan jiwa, semangat dan nilai-nilai perjuangan 1945 dilanjutkan kepada generasi muda, dan makin ditingkatkan diberbagai jenjang tingkatan pendidikan mulai dari TK sampai dengan perguruan tinggi.
- h. Dalam rangka memperluas kesempatan untuk memperoleh pendidikan, perlu tetap diperhatikan kesempatan belajar dan kesempatan meningkatkan keterampilan bagi anak yang kurang mampu, menyandang cacat maupun bertempat di daerah terpencil. Anak didik berbakat perlu mendapatkan perlakuan khusus agar dapat mengembangkan kemampuan sesuai dengan tingkat pertumbuhan pribadinya.
- i. Pembinaan pendidikan nasional secara fungsional perlu lebih dimantapkan demi terciptanya keterpaduan dan keserasian antara pendidikan umum dan kejuruan, latihan kerja dan keterampilan serta pendidikan latihan dan kedinasan antara lain dalam persyaratan mutu dan pengelolaannya.
- j. Pendidikan luar sekolah termasuk pendidikan yang bersifat kemasyarakatan seperti kepramukaan dan berbagai latihan keterampilan perlu ditingkatkan dan diperluas dalam rangka mengembangkan minat, bakat dan kemampuan serta memberikan kesempatan yang lebih luas untuk bekerja dan berusaha bagi anggota masyarakat.
- k. Perguruan tinggi harus dikembangkan dan diarahkan untuk mendidik mahasiswa agar mampu meningkatkan daya penalaran, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, berjiwa penuh pengabdian serta memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap bangsa dan negara. Sejalan dengan itu pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di perguruan tinggi ditingkatkan melalui penelitian sesuai kebutuhan pembangunan masa sekarang dan masa depan. Selanjutnya tata kehidupan kampus dikembangkan sebagai masyarakat ilmiah yang berwawasan budaya bangsa, bermoral ideologi Pancasila dan berkepribadian Indonesia.
- l. Peranan perguruan tinggi dan lembaga penelitian dalam menunjang kegiatan pembangunan makin ditingkatkan, antara lain dengan memantapkan iklim menjamin kebebasan mimbar akademik secara kreatif, konstruktif, dan bertanggung jawab sehingga mampu memberikan hasil pengkajian dan penelitian yang bermutu dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bagi masyarakat yang sedang membangun.
- m. Pendidikan dan pengajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional perlu terus ditingkatkan dan diperluas sehingga mencakup semua lembaga pendidikan dan menjangkau masyarakat luas.
- n. Pendidikan dan pembinaan guru serta tenaga pendidikan lainnya pada semua jenjang dan jenis pendidikan di dalam atau di luar sekolah perlu ditingkatkan dan diselenggarakan secara terpadu dan tenaga pendidikan lainnya untuk menghasilkan guru yang bermutu dan dalam jumlah yang memadai, serta perlu terus ditingkatkan pengembangan karir dan

kesejahteraannya, termasuk pemberian penghargaan bagi guru dan tenaga pendidikan yang lain yang berprestasi.

- o. Sarana dan prasarana pendidikan seperti gedung dan sekolah termasuk ruang perpustakaan, keterampilan, praktek dan laboratorium beserta peralatannya dan media pendidikan dan fasilitas lainnya perlu terus disempurnakan, ditingkatkan dan lebih didayagunakan.
- p. Penulisan dan penerjemahan serta pengadaan buku pelajaran, buku ilmu pengetahuan dan terbitan pendidikan lainnya perlu ditingkatkan jumlah dan mutunya dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat sehingga lebih menunjang kemajuan dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- q. Berdasarkan apa yang termuat dalam undang-undang dari GBHN tersebut dalam konteks pelaksanaan demokrasi merupakan suatu proses untuk memberikan jaminan dan kepastian adanya persamaan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu pelaksanaan demokrasi pendidikan tidak hanya sebatas memberikan kesempatan belajar akan tetapi juga fasilitas pendidikan yang harus dipenuhi dengan berorientasi pada pendidikan yang mengedepankan mutu dengan relevansi dengan keserasian lapangan kerja. Dengan demikian semua anggota lapisan masyarakat dapat terpenuhi kebutuhan pendidikannya sejalan dengan yang diharapkan dalam kehidupannya.

SIMPULAN

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa: pendidikan nasional cenderung menempatkan porsi proses pembelajaran lebih besar dari pada memberikan solusi pendidikan sehingga kegiatan pendidikan cenderung diidentikkan dengan proses peningkatan kemampuan, keterampilan dan kecenderungan belaka. Sementara itu, urusan pembentukan kepribadian unggul dan budaya kualitas belum diperhatikan secara mendasar. Suasana ini berpengaruh langsung pada orientasi pembelajaran yang lebih mengutamakan proses penguasaan materi dan nilai dari pada pembentukan kepribadian. Sistem dan proses itulah yang menyebabkan ketidakseimbangan kualitas diri. Untuk menciptakan pendidikan berkualitas di sekolah harus memerlukan sistem manajemen yang benar-benar dapat dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Manifestasi pendidikan berkualitas harus dilakukan beberapa langkah inovasi pendidikan yang memberi implikasi positif dan kontribusi besar pada peserta didik sehingga cita-cita bangsa untuk menyejahterakan rakyatnya dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat baik mikro maupun makro.

DAFTAR PUSTAKA

Djumberansyah Indar M.,1994*Filsafat Pendidikan*, Surabaya: Karya Abditama

Harsono, 2007.*Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Book Publisher

Hasbullah, 2001.*Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

- Mulyasa, Dedi. 2011. *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing*, Bandung: Rosda Karya
- Sallis, Edward. 2006. *Manajemen Mutu Pendidikan*, Ircisod
- Suyanto dan Abbas., 2001. *Wajah dan Dinamika Pendidikan Anak Bangsa*, Yogyakarta: Adicita Karya Nusa
- Marno dan Triyo Supriyanto, 2008. *Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam*, Bandung: Refrika Aditama.
- Mastuhu, 1999. *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Nata, Abudin. 2003. *Manajemen Pendidikan; Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media
- Tilaar, H.A. R. 2003 *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Zuhari, dkk. 1983. *Metodik Khusus Pendidikan Agama; Dilengkapi dengan Sistem Modul dan Permainan Simulasi* (Surabaya: Biro Ilmiah Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya dan Usaha Offset Printing.